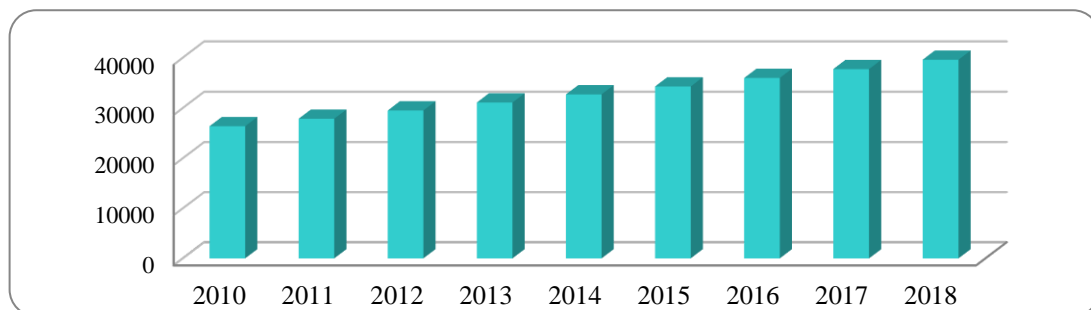


BAB 1**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan semua negara, kesejahteraan yang direpresentasikan oleh stabilisasi ekonomi hanya dapat tercapai melalui pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai proses yang dilakukan secara berkelanjutan dan terencana untuk mencapai kondisi masyarakat yang lebih baik (Nangarumba, 2015). Pembangunan ekonomi juga diartikan pula peningkatan pendapatan perkapita, pendapatan perkapita yang meningkat mencerminkan adanya tambahan pendapatan dan perbaikan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat (Arsyad, 1999). Gambar 1.1 menunjukkan PDRB perkapita Jawa Timur dari tahun 2010 hingga tahun 2018.

**Gambar 1.1**

PDRB Perkapita ADHK Provinsi Jawa Timur, 2010-2018 (ribu rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020 (diolah)

Pendapatan perkapita didapatkan dengan membagi total pendapatan dengan jumlah penduduk. Nilai PDRB perkapita Provinsi Jawa Timur atas dasar harga konstan dalam gambar tersebut menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Meski demikian, diperlukan peninjauan terkait dengan tingkat distribusi pendapatan, untuk mengetahui apakah kenaikan pendapatan yang ada dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat atau hanya terpusat pada golongan ekonomi tertentu.

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses meningkatnya PDRB perkapita penduduk dalam jangka panjang diikuti perbaikan sistem kelembagaan yang ada. Menurut Todaro & Smith (2011), pembangunan ekonomi mencakup proses perubahan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, serta penanggulangan kemiskinan. Todaro & Smith juga menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi dalam skala yang lebih luas dipandang sebagai proses multidimensional yang meliputi perubahan mendasar pada struktur sosial, sikap masyarakat, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan.

Distribusi pendapatan dapat dimaknai sebagai cerminan pemerataan dan ketimpangan bagi hasil dari pendapatan serta pembangunan di suatu negara (Dumairy, 1999). Permasalahan yang terjadi dalam distribusi pendapatan antara lain adalah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan sendiri merupakan keadaan dimana masyarakat kelas ekonomi atas dan masyarakat kelas ekonomi bawah memiliki gap atau selisih yang lebar (Nangarumba, 2015).

Ketimpangan pendapatan yaitu adanya perbedaan penerimaan penghasilan masyarakat sehingga menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan nasional antar masyarakat (Todaro & Smith, 2006). Ketimpangan pendapatan juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, ketimpangan juga berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal menghargai *property rights* (Glaeser, 2006). Ketimpangan pendapatan menggambarkan kondisi ketidakmerataan distribusi pendapatan yang diperoleh masyarakat. Ketimpangan pendapatan tidak dapat dihilangkan dari proses pembangunan suatu daerah. Dengan adanya ketimpangan pendapatan tersebut, akan memberikan dorongan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya agar tidak tertinggal jauh dari daerah di sekitarnya yang sudah baik kualitas hidupnya.

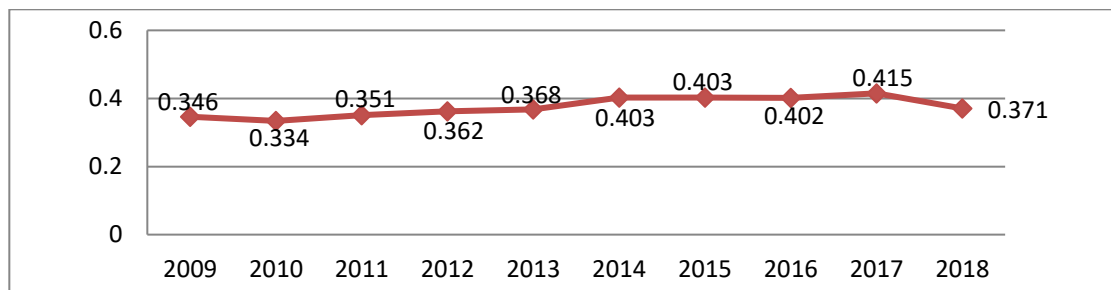
Perhatian terhadap ketimpangan pendapatan tidak hanya kepada masyarakat yang berada di garis kemiskinan namun juga harus memperhatikan masyarakat yang berada

di atas garis kemiskinan. Hal itu dikarenakan karena beberapa alasan sebagai berikut (Todaro,2004) :

1. Ketimpangan pendapatan yang ekstrem menyebabkan inefisiensi ekonomi. Ketimpangan pendapatan menyebabkan alokasi aset yang tidak efisien.
2. Ketimpangan pendapatan menyebabkan kelemahan stabilitas sosial dan solidaritas.
3. Ketimpangan pendapatan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil. Ketimpangan pendapatan bisa dianalisis menggunakan alat ukur berupa koefisien gini

(Todaro,2004).

Koefisien gini merupakan indikator penting dalam mengukur ketimpangan pendapatan (Yao et al., 2005). Koefisien gini digunakan sebagai satuan ukur dalam pemerataan pendapatan dengan nilai antara 0 sampai 1. Koefisien gini yang mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang rendah, begitupun sebaliknya. Gambar 1.2 menunjukkan rasio gini Provinsi Jawa Timur tahun 2009 hingga 2018.



Gambar 1.2

Rasio Gini Provinsi Jawa Timur, Tahun 2009-2018

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020 (diolah)

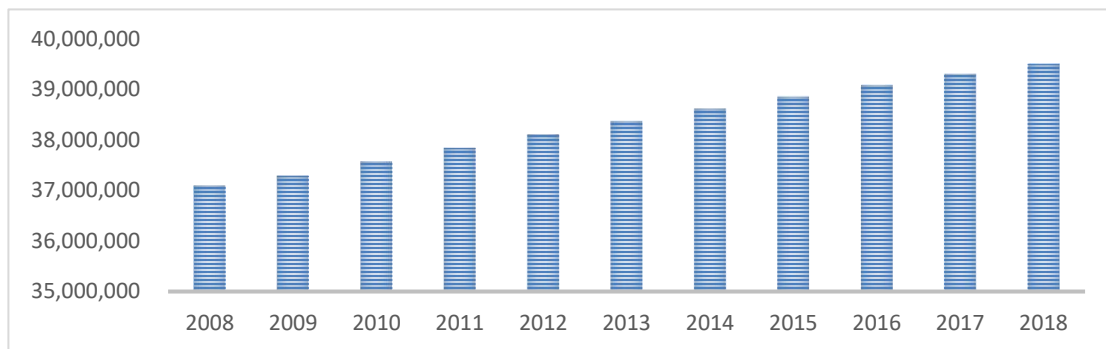
Rasio gini Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu 10 tahun tercatat menunjukkan peningkatan. Menurut Todaro, nilai koefisien gini yang berkisar 0.35 hingga 0.5 menunjukkan tingkat ketimpangan berada pada kategori sedang. Dari data diatas, ditunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki angka tingkat ketimpangan sedang dengan angka gini rasio rata-rata diatas 0.35, tertinggi di tahun 2017 sebesar 0.415.

Berdasarkan uraian rasio gini tersebut, memberikan bukti bahwa peningkatan pendapatan perkapita tidak menjamin penurunan ketimpangan pendapatan. Pendapatan perkapita yang tumbuh secara cepat, tidak secara langsung berpengaruh dalam peningkatan taraf hidup masyarakat, hal ini dikenal sebagai “*trickle down effect*”, yaitu tidak terjadinya peningkatan manfaat dari adanya peningkatan pendapatan perkapita seperti yang diharapkan (Arsyad, 1998).

Suzana dan Kapantow (2015) menerangkan bahwa salah satu penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan adalah adanya perluasan lahan yang tidak merata antar satu daerah dengan daerah yang lainnya. Perluasan lahan disini adalah perluasan lahan dari sektor industri yang menyebabkan penyusutan luas lahan pertanian. Meluasnya lahan industri mengakibatkan lahan pertanian menurun sehingga mengakibatkan ketimpangan pendapatan pada wilayah yang terdampak perluasan lahan industri tersebut. Jannah (2012) juga memberikan hasil penelitian yaitu lahan pertanian menjadi faktor produksi penting yang mempengaruhi hasil dan pendapatan dari petani, ketika luas lahan yang diperuntukkan bagi sektor pertanian semakin luas maka semakin besar pula pendapatan yang akan diperoleh petani. Apabila dari lahan untuk sektor industri lebih mendominasi, maka berimbas pada semakin sempitnya lahan yang diperuntukkan bagi sektor pertanian sehingga mengakibatkan semakin kecil pendapatan yang diterima oleh petani.

Perluasan lahan (*urban sprawl*) atau perubahan peruntukkan penggunaan lahan, pada dasarnya merupakan suatu keadaan yang tidak mampu dihindari dalam pelaksanaan pembangunan (Lisdiyono, 2004). Pesatnya pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan penambahan kebutuhan masyarakat terhadap lahan, acapkali menyebabkan ketidaksesuaian kepentingan atas penggunaan lahan yang menimbulkan akibat ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap rancangan penggunaannya (Khadiyanto, 2005). Sedangkan lahan itu sendiri memiliki sifat yang terbatas dan tidak mampu dilakukan penambahan kecuali dengan sistem reklamasi (Sujarto, 1985 dalam Untoro, 2006). Lahan di perkotaan yang semakin terbatas juga mendorong suatu kota tersebut untuk berkembang secara fisik ke arah pinggiran kota. Berkaitan dengan

penggunaan lahan, daerah sekitar perkotaan merupakan wilayah yang berfluktuasi dalam rencana penggunaan lahan terutama dalam penggunaan lahan pertanian yang berubah menjadi lahan non pertanian, seperti lahan pertanian yang dialihfungsikan sebagai lahan pemukiman atau digunakan menjadi perumahan yang disebabkan oleh adanya pengaruh perkembangan kota akibat pertumbuhan pesat penduduk (Rahayu, 2009).



Gambar 1.3

Penduduk Jawa Timur, Tahun 2008-2018 (Ribuan Jiwa)

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020 (diolah)

Gambar 1.3 menunjukkan tren penduduk Jawa Timur dari tahun 2008 sampai tahun 2018 yang mengalami peningkatan secara signifikan hingga mencapai 39.500.851 ribu jiwa. Seiring dengan perkembangan jaman, peningkatan jumlah penduduk terutama di kota-kota besar memicu peningkatan biaya kebutuhan hidup dan juga kebutuhan akan lahan semakin meningkat. Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di kota maupun desa mendorong peningkatan akan kebutuhan lahan. Terbatasnya ruang di kota-kota besar mengakibatkan daerah pinggiran kota menjadi alternatif pilihan untuk memenuhi kebutuhan akan ruang tersebut. Fenomena alih lahan pada pinggiran kota disebut dengan “*invasion*”.

Aktivitas pergeseran kenampakan fisik wilayah kota ke arah luar ini dikenal dengan “*urban sprawl*”. Yunus (2006) menyatakan *urban sprawl* sebagai proses transformasi fisiko-spasial dari bentuk-bentuk kedesaan menjadi bentuk-bentuk kekotaan. *Urban sprawl* merupakan proses perembetan kenampakan fisik suatu kota ke arah luarnya dengan karakteristik perkembangan secara *urban sprawl* berupa *single-*

use zoning, penggunaan lahan berkepadatan rendah, ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, serta desain kota yang homogen (Pratama dan Ariasta, 2016). *Urban sprawl*, berasal dari Bahasa Inggris. *Urban* didefinisikan sebagai sebuah kota, *sprawl* memiliki arti datang, pergi, tersebar secara acak yang kemudian *urban sprawl* dikenal sebagai pemekaran kota ke daerah-daerah di sekitarnya secara tidak terstruktur, acak, tanpa adanya rencana. Dengan kata lain, perdesaan yang menjadi perkotaan. Perdesaan yang dikenal sebagai penyokong kehidupan perkotaan, seperti, pertanian, budidaya, peternakan dan sebagainya, telah berubah fungsi menjadi pemukiman padat penduduk, bahkan beralih fungsi menjadi kawasan industri. *Urban sprawl* ditandai dengan adanya gedung-gedung vertikal maupun horizontal, bertambahnya fasilitas jalan, sistem drainase kota yang baik, dan ruang terbuka hijau.

Urban sprawl berpotensi mempengaruhi struktur fisik suatu wilayah yaitu melalui pola penyebaran permukiman yang cenderung melebar ke samping kiri kanan jalur transportasi atau seringkali diikuti oleh meluasnya jalan-jalan utama sebagai pusat fasilitas. Pada struktur kependudukannya, *urban sprawl* menyebabkan pola penyebaran penduduk melebar ke samping kiri kanan jalan arteri. Sementara pada struktur ekonomi, *urban sprawl* mempengaruhi pola kegiatan ekonomi penduduk ke arah non pertanian yang mendorong penurunan luas lahan pertanian karena mayoritas dialihfungsikan sebagai lahan permukiman (Yunus, 1999).

Terdapat faktor yang menyebabkan fenomena *urban sprawl* muncul yaitu:

1. Harga tanah murah yaitu biaya pembelian tanah di pinggiran kota biasanya lebih rendah sehingga banyak para pengembang atau masyarakat mengincar daerah pinggiran sebagai sasaran ekspansi bisnis baru. Developer permukiman juga banyak mengincar wilayah seperti ini.
2. Pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan daerah yang pesat seperti jalan raya, tol, kereta api, bandara dan lainnya menjadi pembuka jalan berkembangnya wilayah pinggiran. Kehadiran jalan raya membuka jalan bagi masyarakat untuk melintas dan tentunya akan sangat menguntungkan jika memiliki fungsi bisnis di daerah tersebut.

3. Kenaikan standar hidup yaitu adanya kenaikan kesejahteraan terutama pendapatan seseorang maka ia punya kemampuan membayar lebih untuk berpergian bolak-balik jarak jauh untuk bekerja dan kembali ke rumah.
4. Perencanaan kota kurang yaitu terdapat kota-kota yang sangat buruk dalam hal kualitas hidup seperti macet, polusi, tidak ada pohon, panas dan lainnya. Sehingga orang akan mencari lokasi baru untuk menemukan kedamaian di daerah pinggiran.
5. Tarif pajak rumah rendah yaitu kota biasanya akan memiliki pajak properti tinggi, dan biasanya Anda dapat menghindari pajak ini dengan tinggal di pinggiran luar karena pajak biasanya lebih rendah daripada mereka akan berada dalam pusat bisnis atau CBD.
6. Peningkatan pertumbuhan penduduk yaitu faktor lain yang berkontribusi terhadap *urban sprawl* adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Semakin bertambahnya jumlah penduduk kota yang tumbuh di luar kapasitas, masyarakat setempat terus menyebar lebih jauh dari pusat kota yang mengakibatkan penyebaran penduduk tidak teratur.
7. Preferensi konsumen yaitu orang dalam kelompok berpenghasilan tinggi memiliki preferensi lebih kuat terhadap rumah yang lebih besar, lebih banyak kamar, balkon yang lebih besar dan rumput yang lebih besar. Hal ini juga menyebabkan perkotaan karena pilihan ini tidak tersedia di kota-kota ramai. Orang umumnya melihat keluar untuk daerah pemukiman *low-density* di mana mereka bisa mendapatkan rumah sesuai dengan preferensi mereka.

Fenomena *urban sprawl* memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari *urban sprawl* adalah perdesaan dan perkotaan setara, akses dari desa ke kota semakin mudah, karena penambahan fasilitas-fasilitas yang menunjang dari pemerintah dan pertumbuhan penduduk di perkotaan dan perdesaan sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu, *urban sprawl* juga memiliki dampak negatif yaitu lahan pertanian dan lahan yang ada di perdesaan akan berganti menjadi lahan pemukiman bagi masyarakat yang mengalami *urban sprawl*. Tatanan kota yang

semakin tidak terstruktur karena RTRW yang dirancang tidak sesuai dengan kondisi eksistingnya. Meningkatnya tingkat polusi udara, air dan tanah karena pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Semakin banyak penduduk yang tinggal semakin banyak pula kebutuhan yang harus dipenuhi, menyebabkan sumber daya alam sekitar semakin menipis. Biaya pengiriman dari kota ke desa yang aksesnya cukup jauh menyebabkan tingginya harga barang sehingga dikenakan wajib pajak. Dampak yang terakhir adalah akan terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat kelas menengah ke bawah dengan masyarakat menengah ke atas.

Problematika lahan selalu membayangi proses pembangunan permukiman, utamanya pada kota-kota besar karena kendala ketersediaan lahan. Pemusatan pengembangan pertumbuhan penduduk ke pinggiran kota merupakan dampak dari adanya peningkatan aktivitas kota yang tidak dapat lagi ditampung oleh kemampuan kota itu sendiri. Peningkatan jumlah penduduk merupakan salah satu indikator pertumbuhan penduduk yang bergeser ke pinggiran kota (*sub urban*) yang pada akhirnya menyebabkan alih guna lahan. Terbatasnya ruang di perkotaan menyebabkan daerah pinggiran kota sebagai alternatif solusi dari permasalahan yang ada.

Peningkatan kebutuhan akan ruang setiap tahunnya mendorong perkembangan daerah pinggiran kota, selain itu hal ini juga mendorong daerah lain untuk berkembang secara acak, kemudian juga berdampak kepada ketersediaan lahan produktif yang mengakibatkan perubahan bentuk kota yang tidak teratur. Perubahan bentuk kota dapat dilihat dari pola jaringan jalan, penggunaan lahan, serta tipe karakteristik bangunan yang digunakan (Hanief & Dewi, 2014). Ketidakseimbangan perluasan lahan berimplikasi yang penting bagi ketimpangan pendapatan pada suatu wilayah yaitu memberikan dampak pada ketimpangan pendapatan yang mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan ekonomi (Wei *et al.*, 2017). Penelitian Wang *et al* (2019) di China menerangkan bahwa pengembangan lahan perkotaan berpengaruh positif signifikan terhadap kesenjangan pendapatan perkotaan dan pedesaan.

Dari latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini terfokus di kawasan Gerbangkertosusila. Dasar dari Perencanaan di Kawasan Gerbangkertosusila

adalah terletak didalam Peraturan Pemerintah No. 47/ 1996 mengenai RTRW Nasional, dan didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.4/1996 sampai tahun 2011-2012 dengan dibentuk satuan wilayah pembangunan (SWP) Gerbangkertosusila. Dengan cakupan kabupaten dan kota yang ada di dalamnya yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan. (Fitriyah dan Rachmawati, 2012). Gerbangkertosusila lebih sering disebut GKS yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah kabupaten dan kota tertentu di Provinsi Jawa Timur, yang wilayah daerahnya saling berhimpitan satu sama lain.

Pembentukan kawasan Gerbangkertosusila dihadapkan pada permasalahan yang bermula dari perbandingan pendapatan perkapita setiap daerah. Daerah dengan jumlah penduduk yang besar cenderung menunjukkan angka pendapatan per kapita yang tinggi sedangkan daerah dengan jumlah penduduk yang kecil cenderung menunjukkan angka pendapatan perkapita rendah. Perbedaan angka pendapatan perkapita mempengaruhi kondisi perekonomian di daerah tersebut. Perbedaan yang cenderung tinggi mengindikasikan terjadi ketimpangan pendapatan di kawasan Gerbangkertosusila. Kawasan metropolitan Gerbangkertosusila merupakan satu dari sembilan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) yang ada di Jawa Timur. Gerbangkertosusila terdiri dari 7 kabupaten atau kota yang menjadi anggota Gerbangkertosusila dengan rincian 2 wilayah administrasi tingkat kota dan 5 wilayah administrasi tingkat kabupaten (Hartyanto,2014). Gerbangkertosusila merupakan suatu kawasan sebagai pusat kegiatan perekonomian dari daerah – daerah lain di sekitar yang memiliki dampak yang besar bagi perekonomian utamanya guna peningkatan kondisi pembangunan ekonomi bagi daerah di sekitarnya. Terciptanya berbagai sektor di setiap daerahnya menimbulkan berbagai perbedaan tingkat keunggulan sektor yang dimiliki di kawasan Gerbangkertosusila.

Pembentukan kawasan Gerbangkertosusila dihadapkan pada permasalahan yang bermula dari perbandingan pendapatan per kapita setiap daerah dan kemudian berlanjut ke permasalahan ketimpangan pendapatan (Mahardika, 2009). Daerah dengan jumlah penduduk yang besar cenderung menunjukkan angka pendapatan per kapita yang tinggi

sedangkan daerah dengan jumlah penduduk yang kecil cenderung menunjukkan angka pendapatan perkapita rendah. Perbedaan angka pendapatan perkapita mempengaruhi kondisi perekonomian di daerah tersebut. Perbedaan yang cenderung tinggi mengindikasikan terjadi ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut. Kawasan Gerbangkertosusila merupakan suatu kawasan sebagai pusat kegiatan perekonomian dari daerah – daerah lain di sekitar yang memiliki dampak yang besar bagi perekonomian utamanya guna peningkatan kondisi pembangunan ekonomi bagi daerah di sekitarnya. Terciptanya berbagai sektor di setiap daerahnya menimbulkan berbagai perbedaan tingkat keunggulan sektor yang dimiliki, sehingga terdapat kesenjangan ekonomi yang mengakibatkan ketimpangan pendapatan di kabupaten dan kota kawasan Gerbangkertosusila. Apabila suatu pembangunan ekonomi hanya terpusat pada daerah-daerah pusat pertumbuhan saja maka *trickle down effect* (dampak penetesan kebawah) yang diharapkan akan sulit tercapai. Ketidakmerataan pembangunan ekonomi ini menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan di kawasan Gerbangkertosusila.

Permasalahan perluasan lahan juga menjadi salah satu permasalahan yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan di Kawasan Gerbangkertosusila (Fitriyah & Rachmawati, 2013). Perluasan lahan yang semula lahan sawah menjadi lahan non sawah di kawasan Gerbangkertosusila juga semakin berkembang. Gejala ini cenderung terjadi di desa-desa di wilayah pinggiran kota di mana lahan persawahan masih tersedia cukup luas (Bachriadi 1997). Lahan sawah yang beralih fungsi menjadi lahan non sawah di kawasan Gerbangkertosusila disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk dengan akibat banyak lahan sawah yang beralih fungsi menjadi wisma, hotel, asrama, rumah kos, jalan, apartemen, permukiman, industri dan pemondokan mahasiswa. Hal-hal tersebut menyebabkan dorongan terjadinya fenomena *urban sprawl* di kawasan Gerbangkertosusila. *Urban Sprawl* yang terjadi di kawasan Gerbangkertosusila tersebut merupakan fenomena yang sering terjadi di kota-kota besar yang tingkat kepadatan penduduknya semakin tinggi sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi. Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Bruegmann (2015), gejala *urban sprawl* akan timbul ke

permukaan ketika sebuah kota sudah berada pada posisi kematangan ekonomi dan kesejahteraan penduduk yang memadai. Mereka yang mempunyai kemampuan memilih akan pindah ke wilayah pinggiran kota dan secara alami (karena kemampuan membayar dan preferensi sosial) akan berkumpul dan membentuk komunitas yang relatif homogen (Leisch 2002).

Dampak lanjutan dari masyarakat yang terdampak dari fenomena *urban sprawl* di kawasan Gerbangkertosusila adalah praktik marjinalisasi kelompok tertentu, artinya kelompok masyarakat tani yang terdampak dari *urban sprawl* akan menjadi kelompok masyarakat yang marjinal. Masyarakat petani yang terbiasa memperoleh penghasilan dari sektor pertanian harus menghadapi kenyataan sosial berupa tersedianya pekerjaan yang tidak sesuai dengan kapabilitas dan keterampilan mereka sebagai seorang petani yang akhirnya meminggirkan mereka, akibatnya akan berimplikasi serius terhadap taraf hidup layak masyarakat petani yang semakin tereklusi secara sosial dan pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan di kawasan Gerbangkertosusila. Dampak dari modernisasi pedesaan juga memberikan implikasi serius terhadap kesetaraan ekonomi di kawasan Gerbangkertosusila, menurut Dharmawan (2007) juga mengungkapkan bahwa modernisasi pedesaan telah membawa ketimpangan pendapatan (*inequality*) terhadap sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat di kawasan Gerbangkertosusila. Terbatasnya atau timpangnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendapatan akibat kurangnya kesiapan masyarakat desa untuk menghadapi modernisasi membuat hanya mereka yang memiliki modal ekonomi atau kekuasaan yang dapat mengakses lahan saja yang tersisa.

Penelitian yang difokuskan pada kawasan Gerbangkertosusila ini menjadi menarik untuk dilakukan mengingat kawasan Gerbangkertosusila memiliki potensi untuk berkembang pesat. Gerbangkertosusila merupakan kawasan yang memiliki perkembangan terhadap kegiatan industri, pemanfaatan sumberdaya, tanaman hortikultura, kehutanan, aktivitas peternakan, kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, pertambangan, perdagangan dan jasa, sektor pendidikan, sektor

kesehatan, kegiatan pariwisata dan transportasi. Kawasan Gerbangkertosusila sendiri menjadi sentra bagi banyak kegiatan ekonomi sehingga memiliki tingkat perekonomian yang lebih tinggi dibandingkan kawasan yang berada di luar wilayah Gerbangkertosusila.

Berdasarkan latar belakang diatas didapati judul "Analisis Pengaruh Perluasan Lahan Perkotaan (*Urban Sprawl*) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Gerbangkertosusila".

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh perluasan lahan dengan variabel dependen yang berbeda beda terhadap ketimpangan pendapatan telah banyak dilakukan di berbagai wilayah dan negara. Seperti pada penelitian Ikhsan et al (2019) yang menunjukkan bahwa variabel industri tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sebaliknya pada penelitian Musfidar (2012) memiliki hasil yang berbeda, yaitu variabel industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian selanjutnya adalah penelitian Akai et al (2005) dengan hasil variabel panjang jalan memiliki hubungan negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, penelitian ini berbeda dengan Amin Makmuri (2017) yang memberikan hasil bahwa variabel jalan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana pengaruh perluasan lahan yang diprosikan dengan variabel luas lahan sawah, luas lahan permukiman, kemudian variabel jumlah industri dan panjang jalan terhadap ketimpangan pendapatan dengan cakupan wilayah yang spesifik yakni Kawasan Gerbangkertosusila.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel perluasan lahan perkotaan (*urban sprawl*) yaitu luas lahan sawah, luas lahan permukiman, jumlah industri dan panjang jalan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota kawasan Gerbangkertosusila.

1.4 Sistematika Penelitian

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 berisi tentang latar belakang, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 berisi tentang berbagai teori yang digunakan pada penelitian ini yang berlandaskan penelitian terdahulu, dan hipotesis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab 3 menjelaskan tentang pendekatan penelitian, definisi operasional, model empiris, jenis dan sumber data serta teknik analisis yang digunakan pada penelitian.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab 4 menjelaskan tentang gambaran umum penelitian, deskripsi statistik masing masing variabel, hasil estimasi dan pembuktian hipotesis, serta interpretasi hasil dan pembahasan.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab 5 terdiri dari ringkasan hasil, kesimpulan, saran, serta keterbatasan dari penulis tentang penelitian yang diambil.